

PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBINAAN ANAK JALANAN (Studi Kasus Di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua)

Lina Andayani^{1*}, Peliman Ndibau¹, Nirwana Try Kumala Putri²

¹Dosen Ilmu Pemerintahan

²Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

FESSOSPOL – USTJ

Jl. Raya Sentani, Distrik Heram, Kota Jayapura- Papua

*Email : lina.andayanigemini@gmail.com

ABSTRACT

Mengetahui peran yang dijalankan oleh Dinas Sosial dalam mendukung anak jalanan di Kabupaten Jayapura merupakan hal yang sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai program-program yang diimplementasikan oleh Dinas Sosial guna meningkatkan kualitas hidup anak jalanan, yang sering kali memunculkan kekhawatiran masyarakat karena dampak negatifnya. Salah satu tugas utama Dinas Sosial adalah mengelola urusan rumah tangga daerah serta memberikan bantuan dalam bidang pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, dan pembinaan tenaga kerja. Dalam upaya membina anak jalanan di Kabupaten Jayapura, program kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial meliputi pembinaan mental dan pelatihan keterampilan. Selain itu, perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial yang bertujuan membantu anak jalanan untuk hidup mandiri merupakan bagian dari program rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan peran Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan di Kabupaten Jayapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial dalam menangani anak jalanan meliputi perencanaan dan pengawasan, sosialisasi kepada anak jalanan dan masyarakat, pembinaan serta pencegahan, program rehabilitasi, dan pelatihan keterampilan. Namun, Dinas Sosial menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap anak jalanan serta keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung program pembinaan dan pelatihan anak jalanan. Hal ini mengindikasikan bahwa keterbatasan anggaran dan fasilitas menghambat Dinas Sosial dalam menjalankan tugasnya secara optimal. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberadaan anak jalanan serta berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial di Kabupaten Jayapura untuk membina mereka.

Kata kunci: Dinas sosial, pembinaan, anak jalanan, kualitatif

ABSTRACT

It is very important to know the role played by the Social Service in supporting street children in Jayapura Regency. This study aims to provide insight into the programs implemented by the Social Service to improve the quality of life of street children, which often raises public concerns due to their negative impacts. One of the main tasks of the Social Service is to manage regional household affairs and provide assistance in the fields of social welfare development, social rehabilitation, and workforce development. In an effort to develop street children in Jayapura Regency, the work programs implemented by the Social Service include mental development and skills training. In addition, social protection and social empowerment aimed at helping street children to live independently are part of the rehabilitation program. This study uses a qualitative approach to describe and explain the role of the Social Service in developing street children in Jayapura

Regency. The results of the study show that the role of the Social Service in handling street children includes planning and supervision, socialization to street children and the community, development and prevention, rehabilitation programs, and skills training. However, the Social Service faces a number of challenges, such as the lack of public awareness and concern for street children and the limited facilities and infrastructure that support the development and training program for street children. This indicates that budget and facility limitations hinder the Social Service from carrying out its duties optimally. This study provides an understanding of the factors that influence the existence of street children and the various efforts that have been made by the Social Service in Jayapura Regency to foster them.

Keywords: *Social services, development, street children, qualitative*

I. PENDAHULUAN

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa penanganan anak jalanan di Kota Serang menggunakan standar dan sasaran kebijakan dan melibatkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Keterlibatan sumber daya dan lembaga sosial lainnya, seperti lembaga pemerhati anak jalanan, dapat membantu pelaksanaan kebijakan dengan membangun komunikasi antar badan pelaksana, di mana setiap instansi berperan dan bekerja sama untuk melaksanakan program penjangkauan, proses pembinaan, dan pelatihan keterampilan. Ini dilakukan untuk melatih keterampilan yang diperlukan untuk hidup mandiri setelah kembali ke keluarga dan masyarakat. Menjadi anak jalanan bukanlah pilihan hidup yang diinginkan oleh siapa pun, itu adalah keterpaksaan yang harus diterima karena alasan tertentu. Namun demikian, anak jalanan telah berkembang menjadi fenomena yang memerlukan perhatian.[1] Studi lain juga menemukan kebijakan pemerintah Kota Semarang untuk mencegah dan mengurangi jumlah anak jalanan yang meningkat. Pemerintah Kota Semarang, melalui program kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP, mengadakan razia terhadap anak-anak jalanan sekaligus mengedukasi masyarakat secara langsung mengenai larangan memberikan uang kepada pengemis, pengamen, dan anak jalanan. Kampanye ini diperkuat dengan Raperda Larangan Beri Uang pada Anak Jalanan. Di Kota Semarang, penanganan anak jalanan dilakukan melalui pemberian beasiswa dan pelatihan kewirausahaan.[2]

Dari hasil penelitian terdahulu dapat dibandingkan dengan kondisi yang ada di daerah Kabupaten Jayapura, khususnya dalam penanganan anak jalanan di Kota Serang dan Semarang yang melakukan pendekatan dengan

lembaga pemerhati anak jalanan serta secara kontinyu melakukan razia dan menertibkan anak jalanan. Selain itu sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada anak jalanan. Hal ini dapat menjadi gambaran untuk diterapkan di Kabupaten Jayapura agar dapat menekan jumlah anak jalanan.

Hidup sebagai anak jalanan sering kali menjadi kondisi yang harus diterima karena berbagai alasan, bukan keputusan yang diinginkan oleh siapa pun. Namun, keberadaan anak jalanan telah menjadi isu yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Dari segi psikologi, mereka adalah anak-anak yang belum sepenuhnya memiliki kestabilan mental dan emosional. Sementara itu, kerasnya kehidupan di jalanan yang mereka alami sering memberikan pengaruh buruk pada pembentukan kepribadian mereka.[3]

Di Indonesia, maraknya fenomena anak jalanan mencerminkan permasalahan sosial yang rumit. Anak-anak ini hidup dalam situasi yang tidak memberikan kepastian masa depan, yang pada akhirnya menjadi tantangan bagi keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Perkembangan anak jalanan, terutama di Kabupaten Jayapura, adalah salah satu fenomena sosial yang disebabkan oleh situasi ekonomi saat ini. Ada banyak alasan mengapa anak-anak terjerumus ke dalam kehidupan di jalanan. Selain keadaan ekonomi keluarga yang buruk atau tekanan kemiskinan, masalah anak jalanan juga terkait dengan ketidakharmonisan rumah tangga, pengasuhan yang terlalu keras, dan dampak lingkungan komunitas anak. Anak-anak seringkali dipaksa untuk mencari nafkah sendiri karena kondisi ini.

Karena anak jalanan dapat membahayakan ketertiban, kebersihan, dan keamanan serta keindahan kota, jumlah mereka yang meningkat semakin mencemaskan. Selain itu, mereka sering

melakukan tindakan yang tidak pantas, seperti berkata kotor, mengganggu ketertiban di jalanan, dan melakukan pemalakan dengan memaksa pengemudi mobil untuk membayar sejumlah uang. Anak-anak di jalanan hidup secara bebas, yang membedakannya dari anak-anak yang diasuh oleh orang tuanya. Mereka memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang mungkin tidak pantas dilakukan anak-anak seusia mereka. Mereka biasanya terlihat berpakaian kotor, tidak rapih, merokok, dan menggunakan lem aibon.

Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Jayapura

Tabel 1. Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS)

No	Jenis PMKS	L	P	Jumlah
1	Anak Terlantar	315	196	511
2	Anak yang berhadapan dengan hukum	6	4	10
3	Anak jalanan	7	3	10
4	Anak disabilitas	53	40	93

Sumber : Dinas Sosial Kab. Jayapura

Anak-anak jalanan di Kabupaten Jayapura melakukan banyak hal, seperti berjaga-jaga di tempat parkir, menghirup lem aibon, memulung botol kaleng kosong, dan sebagainya. Mereka beroperasi di tempat-tempat yang ramai, biasanya di pasar, pusat perbelanjaan, dan halaman parkir apotik Sentani. Resiko yang dapat diidentifikasi termasuk kurang gizi (minum minuman keras), tindakan kriminal (melempar batu ke orang-orang di jalan) dan kelangsungan hidup terancam.

Kepala Dinas Sosial melatih keterampilan anak jalanan dalam kelompok lima anak. Sampai tahun ini, masih ada 30 anak yang telah dilatih keterampilan. Salah satu kendala yang menghalangi program pembinaan yang telah diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jayapura kepada anak jalanan adalah bahwa pembinaan terus dilakukan di luar Papua karena kekurangan instruktur.

Melihat berbagai tantangan yang dihadapi oleh anak jalanan, Pemerintah Kabupaten Jayapura, khususnya melalui Dinas Sosial, perlu merancang program pembinaan berkelanjutan bagi mereka. Program ini bertujuan untuk menetapkan kebijakan utama yang dapat mengatasi permasalahan anak jalanan secara menyeluruh. Selain itu, program

pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial memiliki tujuan untuk menciptakan peluang kerja yang sesuai dengan usia anak dan tidak membahayakan keselamatan mereka. Dengan demikian, anak-anak tidak perlu bekerja di jalanan, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk bersekolah dan bermain. Topik ini menarik perhatian penulis, terutama dalam konteks peran Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan di Sentani, Kabupaten Jayapura.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperlukan untuk penelitian ini meliputi:

1. Data Primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara yang dilakukan penulis di Kantor Dinas Sosial Sentani, Kabupaten Jayapura, untuk memahami pelaksanaan pembinaan anak jalanan. Informasi dikumpulkan dari berbagai pihak terkait di Dinas Sosial, termasuk Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Rehabilitasi Pelayanan Sosial, serta Kepala Seksi Rehabilitasi Anak Nakal, Anak Terlantar, dan Anak Jalanan.
2. Data Sekunder diambil dari berbagai dokumen pendukung yang relevan dengan topik penelitian mengenai peran Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Peran

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang dihasilkan oleh pekerjaan. Dalam kehidupan bermasyarakat, apa yang dinamakan "peran" atau "role" merupakan elemen yang selalu berubah dari kedudukannya. Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, mereka menjalankan suatu peran.[4]

Namun, ada beberapa cara untuk menjelaskan peran, seperti peran dalam drama atau teater dan peran karakter. Dalam ilmu sosial, peran berarti apa yang dilakukan seseorang di tempat kerja dan merupakan suatu fungsi dari seseorang yang menduduki jabatan.[5]

Dengan demikian, perangkat peran merujuk pada rangkaian hubungan yang terbentuk berdasarkan peran yang dimiliki seseorang sesuai dengan

status sosialnya. Dalam konteks penelitian ini, peran yang dimaksud adalah perilaku individu yang mencerminkan statusnya dalam masyarakat. Oleh karena itu, peran dapat diartikan sebagai aspek dinamis dari tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh individu atau organisasi yang memiliki posisi tertentu dalam struktur sosial.

B. Perencanaan

Perencanaan adalah cara berpikir tentang masalah sosial dan ekonomi, yang utamanya berkaitan dengan masa depan. Perencanaan berkembang menjadi hubungan antara tujuan dan keputusan yang dibuat secara kolektif saat membuat kebijakan dan program. Perencanaan mengharapkan hasil yang diinginkan, apabila kita memikirkannya dengan serius dan membuat pilihan yang tepat, pemikiran yang bijak akan membawa masa depan yang sukses.[6]

Perencanaan pada dasarnya adalah proses merumuskan tujuan masa depan dan menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapainya. Proses ini dilakukan dengan menguji berbagai rute untuk mencapai tujuan tersebut, memeriksa berbagai ketidakpastian yang ada, mengevaluasi seberapa baik kita dapat mencapai tujuan tersebut, dan kemudian memilih arah dan langkah-langkah terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.[7]

Sebagai kesimpulan dari definisi di atas, perencanaan terdiri dari beberapa komponen, yaitu: 1. Menentukan tujuan yang akan dicapai; 2. Memilih dan menentukan alternatif yang akan digunakan untuk mencapai tujuan; dan 3. Usaha atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih.

C. Pendataan

Pendataan sangat penting karena dapat memberikan informasi tentang tindak kekerasan yang terjadi saat ini, serta metode yang digunakan untuk menangani kasus dan tindakan selanjutnya. Pendataan kasus yang buruk dapat mengakibatkan pendataan kasus yang buruk pula, demikian pula dengan kebijakan penanganan kasus yang buruk. Proses input dan olahan data akan menjadi masalah pendataan. Pendataan sulit dilakukan karena mekanisme penanganan kasus yang tidak jelas di organisasi atau lembaga layanan, dan sulit dilakukan ketika tidak ada sumber daya manusia.[8]

Menurut Biro Pusat Statistik, pendataan diartikan sebagai proses verifikasi hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar untuk analisis atau pandangan tertentu. Oleh karena itu, pendataan dapat dimaknai sebagai proses pengumpulan data secara empiris yang bertujuan untuk membuktikan hasil penelitian. [9]

D. Pengawasan

Pengawasan adalah tugas terakhir yang harus dilakukan oleh manajer. Melalui pengawasan, mereka dapat mengetahui hasil yang telah dicapai. Pengawasan memeriksa apakah tindakan telah sesuai dengan rencana atau standar dan memperbaiki kesalahan.

Pengawasan merupakan upaya sistematis dalam manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah kinerja tersebut sesuai dengan standar yang ditentukan, serta mengambil tindakan korektif yang diperlukan agar sumber daya manusia dapat dimanfaatkan secara optimal dan efisien demi tercapainya tujuan.[10]

Pengawasan diartikan sebagai rangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengevaluasi dengan membandingkan kondisi aktual dengan kondisi yang diharapkan. Pendapat serupa menyebutkan bahwa pengawasan adalah proses memantau pelaksanaan seluruh aktivitas pemerintah untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya [11]

Pemimpin tidak hanya harus mampu merencanakan, mengorganisasikan, dan menggerakkan, tetapi mereka juga harus melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya. Ini memungkinkan pimpinan untuk mengetahui masalah dan tantangan apa yang dihadapi bawahannya saat melakukan pekerjaan, sehingga mereka dapat memperbaikinya.

E. Pemantauan

Pemantauan dapat didefinisikan sebagai pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan secara langsung atau tidak langsung dan melalui laporan masyarakat. Pemantauan sesuai dengan undang-undang dapat didefinisikan sebagai pemantauan pelaksanaan rencana kerja secara langsung atau tidak langsung dan mengidentifikasi

serta mengantisipasi masalah yang mungkin muncul untuk mengambil tindakan segera.[12]

Pemantauan dilakukan agar data atau informasi dari kegiatan yang diamati dapat digunakan untuk membuat keputusan dan tindakan.

F. Sosialisasi

Selama proses sosialisasi, seseorang memperoleh pengetahuan tentang peran yang harus mereka mainkan serta peran yang harus dimainkan oleh orang lain. Dengan menguasai peran-peran ini, seseorang akan belajar berinteraksi dengan orang lain. Tampaknya definisi sosialisasi dalam antropologi menekankan peran, sedangkan definisi sosiologi menekankan sosialisasi.[13]

Selama proses sosialisasi, seorang anak menghadapi lingkungan sosial di mana sikap, pola perilaku, dan norma-norma telah dibentuk. Norma-norma ini terus-menerus berfungsi sebagai referensi atau standar perilaku. Anak-anak memperoleh pengamalan baru dan melakukan proses pembelajaran di lingkungan sosial.

G. Kampanye

Di bidang ilmu pengetahuan, istilah "kampanye" berbeda dengan istilah yang digunakan di bidang lain. Sosiologi menyebutnya sosialisasi. Namun, dalam ilmu komunikasi, disebut kampanye. Kampanye bertujuan untuk menyebarkan informasi, konsep, atau gagasan.[14]

Kampanye sosial didefinisikan sebagai sebuah proses dan serangkaian tindakan komunikasi yang direncanakan untuk menyampaikan pesan yang berkaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan dan non-komersial. Oleh karena itu, strategi yang tepat diperlukan untuk menyampaikan pesan dengan efektif ke target audiens.

a. Konsep Pembinaan

Konsep pembinaan, juga dikenal sebagai "konsep pembangunan", adalah proses membuang pola pikir lama yang dianggap salah yang telah mengendalikan diri bagi individu yang bersangkutan. Upaya ini dapat disebut sebagai "cuci otak". Selanjutnya, disiplin ilmu yang dikenal sebagai pembinaan (seperti pembinaan ideologi, wilayah, dan territorial) dibangun dari hasil

penelitian pembinaan dan diajarkan di berbagai institusi pendidikan dan komunitas.[15]

Pembinaan adalah upaya manusia untuk membimbing dan mengarahkan kepribadian dan kemampuan anak-anak, baik dalam pendidikan formal maupun non-formal. Pembinaan memainkan peran penting dalam perkembangan anak, khususnya dalam perkembangan dan perilaku. Pembinaan adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang secara sadar, terencana, terarah, dan teratur. Tindakan bimbingan, pengarahan, dan pengawasan digunakan untuk melaksanakannya.[16]

b. Pelatihan

Pelatihan adalah upaya untuk meningkatkan keterampilan tertentu melalui proses belajar mengajar agar seseorang dapat menerapkan keterampilan tersebut dalam kehidupan mereka. Konsep pelatihan dapat diterapkan ketika (1) terdapat keterampilan tertentu yang perlu dikuasai, (2) penguasaan keterampilan tersebut memerlukan latihan, dan (3) teori hanya membutuhkan sedikit perhatian. [17]

Dalam manajemen sebuah organisasi, baik itu perusahaan, institusi, maupun lembaga pendidikan, pelatihan SDM adalah hal yang sangat penting. Pelatihan SDM mencapai tujuan melalui rangkaian kegiatan yang direncanakan, terorganisir, dan sistematis. Selain itu, langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang cukup untuk mengatasi berbagai situasi yang mungkin muncul di lingkungan kerja.

c. Pencegahan

Tindakan pencegahan merujuk pada upaya untuk menghindari terjadinya sesuatu. Dalam konteks sosial, pengendalian sosial yang bertujuan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan disebut tindakan preventif. Upaya pencegahan ini dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok. Dalam ilmu sosial, tindakan preventif dipahami sebagai langkah untuk mencegah perilaku kriminal yang berpotensi menimbulkan dampak negatif di masa mendatang [18].

Pencegahan atau preventif adalah istilah, prosedur, dan metode yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan interpersonal dan fungsi seseorang sebagai individu, pasangan, atau

orang tua, serta dalam keterlibatannya dalam kelompok, komunitas, atau lembaga.

d. Rehabilitasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), rehabilitasi diartikan sebagai proses pemulihan ke keadaan semula, termasuk pemulihan nama baik, serta usaha memperbaiki fungsi anggota tubuh yang mengalami cacat. Tujuannya adalah agar individu, seperti pasien rumah sakit atau korban bencana, dapat kembali menjadi pribadi yang produktif dan diterima dalam masyarakat. Berdasarkan definisi ini, jelas bahwa setiap orang menginginkan posisi yang diakui dalam masyarakat serta pemulihan keadaan normal untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai aktivitas di sekitarnya. 19]

Pelayanan dan rehabilitasi sosial adalah upaya untuk memulihkan kepercayaan diri, harga diri, kesadaran, dan tanggung jawab sosial untuk masa depan bagi seseorang, keluarganya, dan masyarakat sekitar. Tujuan dari rehabilitasi ini adalah untuk mendorong orang untuk berhenti melakukan hal-hal yang melanggar hukum agama dan sosial budaya, dan untuk mendapatkan kembali kemampuan untuk melakukan fungsi sosialnya dengan benar.

H. Hasil Penelitian

Menjadi anak jalanan adalah keterpaksaan karena masalah ekonomi dan kebutuhan hidup, bukan pilihan yang diinginkan setiap orang. Untuk memastikan kesejahteraan anak jalanan, Dinas Dinas Sosial Kabupaten Jayapura memiliki peran yang signifikan dalam menjalankan program pembinaan dan pengawasan terhadap anak jalanan. Salah satu cara untuk memastikan kesejahteraan anak jalanan adalah dengan memberikan pembinaan secara langsung, seperti pendampingan dan penyediaan rumah singgah. Sebagai bagian dari tanggung jawab untuk pembinaan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jayapura, yaitu peran perencanaan, hal ini akan sangat bermanfaat untuk pemulihan sosialnya.

1. Peran Dinas Sosial

a. Perencanaan

Perencanaan adalah kumpulan tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan adalah garis besar, arahan, atau garis besar yang harus diikuti jika Anda ingin mendapatkan hasil yang baik. Merencanakan

pendataan anak jalanan saat membuat rencana Dinas Sosial. Menurut penelitian di lapangan yang dilakukan oleh penulis, perencanaan awal yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jayapura untuk melakukan pendataan terhadap anak jalanan ini cukup baik. Namun, karena masih banyak anak jalanan yang berkeliaran atau beraktivitas di jalanan, pelaksanaannya kurang efektif. Dinas Sosial tidak melakukan pendataan secara menyeluruh, jadi data anak jalanan tidak lengkap. Pada proses pendataan ini data yang dapat disampaikan oleh Dinas sosial yang telah didata sebanyak 10 anak jalanan dan mengungkap identitas dan latar belakang anak jalanan tersebut, dilihat dari aspek ekonomi, rata-rata anak jalanan ini berasal dari keluarga yang tidak mampu sehingga memaksakan mereka untuk turun ke jalanan untuk mencari nafkah untuk membantu orang tua.

b. Pengawasan

Pengawasan awal, pengawasan proses, dan pengawasan akhir adalah tiga jenis pengawasan yang berbeda. Pengawasan awal dilakukan saat pekerjaan dimulai untuk mencegah kesalahan. Pengawasan proses dilakukan selama proses pekerjaan tengah untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan tujuan. Dan pengawasan akhir dilakukan saat proses pekerjaan selesai. Berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan baik dari wawancara dan pengamatan pada Dinas Sosial Kabupaten Jayapura dapat diketahui bahwa Dinas Sosial telah melakukan pengawasan terhadap pemantauan dalam program rehabilitasi anak jalanan mulai dari awal pelaksanaan, proses kegiatannya dan pengawasan sampai akhir kegiatan yang dilakukan. Dan pengawasan yang dilakukan Dinas sosial membangun kerjasama untuk pembinaan pelatihan lanjutan dengan Balai besar di kota Makassar. Hal ini dilakukan karena kondisi di Kabupaten Jayapura belum mempunyai tempat khusus untuk digunakan dalam memberikan pelatihan bagi anak jalanan, hal ini yang menghambat proses pembinaan anak jalanan karena tidak didukung oleh anggaran yang memadai.

c. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan dalam bentuk kampanye melalui penyebaran informasi kepada Aparat Pemerintah Kampung, masyarakat, dan orasi di jalanan di seluruh wilayah Sentani. Jenis sosialisasi lainnya dilakukan secara tidak langsung melalui

diskusi dan sosial media sebagai perantara antara individu dan kelompok masyarakat. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa kekurangan anggaran yang diberikan pemerintah Kabupaten Jayapura kepada Dinas Sosial menyebabkan program sosialisasi tidak berjalan secara optimal karena kurangnya dana. Ini berdampak pada masyarakat, yang terus memberikan uang kepada anak jalanan dan melihat masih banyak anak jalanan berkeliaran di tempat umum seperti di pasar, terutama di malam hari. Proses penanganan masalah anak jalanan dapat terhambat karena kurangnya sarana dan prasarana, seperti mobil patroli Dinas Sosial yang khusus untuk menangani anak jalanan. Ketidakstabilan ekonomi masyarakat menyebabkan banyak anak tumbuh dalam keluarga atau dengan orang tua yang tidak memiliki penghasilan memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan dilihat dari aspek sosial, rata-rata anak jalanan ini mempunyai latar belakang keluarga yang tidak harmonis, orang tua bercerai sehingga mereka tidak mendapatkan perhatian keluarga.

J. Pembinaan

Pembinaan yang efektif akan sangat membantu anak jalanan untuk memperbaiki fungsi sosialnya. Namun, Dinas Sosial Kabupaten Jayapura masih gagal mengurangi jumlah anak jalanan di Kabupaten Jayapura yang tidak memiliki keterampilan karena kekurangan dana atau materi. Meskipun Dinas Sosial Kabupaten Jayapura telah memberikan bantuan pembinaan kepada anak jalanan namun masalah sosial masih tetap ada terkait dengan anak jalanan. Pemerintah membuat kebijakan khusus untuk membantu anak terlantar; Kementerian Sosial menambah tenaga kerja untuk pekerja sosial di setiap Kabupaten atau Kota; dan pemerintah kabupaten Jayapura menjaga hak asasi anak dan berbagai masalah kesejahteraan anak.

Untuk memaksimalkan kinerjanya, kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jayapura harus meningkatkan program pendekatan dan pelayanan. Perlu ada kebijakan untuk melindungi anak jalanan dan terlantar. Ini akan meningkatkan kesadaran tentang hak-hak dasar anak dan memberikan perhatian khusus pada anak-anak jalanan atau terlantar. Dalam hal pembinaan anak jalanan di Kabupaten Jayapura, program yang dilakukan oleh Dinas Sosial mengarah pada pembinaan kesehatan anak jalanan dengan melakukan pemeriksaan

kesehatan serta menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga yang dibina oleh Dinas Sosial.

1. Pelatihan

Pelatihan didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang dimaksudkan untuk mengubah kinerja orang dalam melakukan pekerjaannya. Hal yang harus diperhatikan dalam definisi ini adalah empati, yaitu proses pelatihan, peserta pelatihan, kinerja, dan pekerjaan. Proses pelatihan mengacu pada perubahan yang harus dilakukan pada peserta pelatihan.

Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan ketrampilan yang diberikan oleh Dinas Sosial berupa keterampilan perbengkelan, komputer, melukis, bernyanyi, desain grafis yang disesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak tersebut. Namun kendala yang dihadapi adalah Dinas Sosial tidak memberangkatkan semua anak jalanan ke Makasar karena faktor pembiayaan yang besar.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan kreativitas anak jalanan dan membantu mereka mengatur diri mereka dengan lebih baik melalui pelatihan keterampilan yang telah mereka pelajari. Namun dari beberapa anak yang telah mengikuti pelatihan, mereka akan kembali lagi jalanan dengan melakukan kebiasaan merokok ataupun minum minuman keras.

2. Pencegahan

Untuk melakukan pembinaan ini, Dinas Sosial bekerja sama dengan BNN, polisi, kepala kampung, dan lapas narkoba untuk mengawasi anak-anak yang beraktivitas di jalanan. Anak jalanan cukup banyak di Kabupaten Jayapura berdasarkan perkembangan mereka, namun yang terdata hanya 10 karena terkendala kondisi anak jalanan yang sering kabur jika dilakukan pendataan oleh Dinas sosial. Artinya, sebagian besar anak jalanan tidak termasuk dalam kategori anak yang mengalami masalah karena mereka melarikan diri dari rumah dan lingkungan sosialnya. Sulitnya menangani anak jalanan di Kabupaten Jayapura adalah karena latar belakang mereka yang berbeda dan tingkat keterlibatan mereka di jalanan yang tidak dapat disamaratakan. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial yaitu dengan cara turun langsung ke jalanan dan melakukan pendekatan dengan memberikan nasehat dan membawa mereka pulang ke rumah serta memberikan edukasi juga kepada keluarga untuk mengawasi anak-anak dan memantau tempat yang biasa menjadi tempat nongkrong jika berada di luar

rumah agar terhindar dari kebiasaan yang bisa menjerumuskan anak pada perbuatan yang salah.

3. Rehabilitasi

Rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak jalanan dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Program rehabilitasi ini berbentuk pembinaan, di mana anak-anak jalanan diberikan fasilitas serta pelatihan keterampilan yang mencakup pengembangan bakat dan minat mereka. Selain itu, pembinaan mental dan spiritual juga dilakukan dengan tujuan membangun sikap yang positif. Selain itu, anak-anak yang hidup di jalanan juga menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Sosial.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa program rehabilitasi yang dijalankan oleh Dinas Sosial meliputi pemberian motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pembinaan mental spiritual, pembinaan fisik, bimbingan sosial, layanan aksesibilitas, serta pendampingan lanjutan. Namun yang menjadi faktor penghambat adalah aktifitas kerja yang dilakukan anak jalanan sangat tinggi karena tuntutan keluarga sehingga anak jalanan tersebut tidak memiliki kebebasan bermain ataupun belajar seperti anak lainnya. Kondisi ini menjadi perhatian Dinas Sosial untuk melakukan pendekatan yang lebih intensif kepada orang tua agar dapat mendukung program rehabilitasi bagi anak-anak jalanan yang berada di Kabupaten Jayapura.

Anak-anak jalanan di Jayapura tidak hanya berasal dari penduduk asli Jayapura, tetapi juga dari berbagai wilayah di Papua. Mereka hadir dengan beragam latar belakang, seperti ketidakmampuan orang tua membiayai pendidikan, kesulitan memenuhi kebutuhan anak, atau kehilangan orang tua akibat meninggal dunia.

IV. KESIMPULAN

Dinas Sosial Kabupaten Jayapura kurang maksimal dalam pendataan anak jalanan, sehingga program pembinaan anak jalanan belum dilakukan secara menyeluruh. Program pelatihan keterampilan terhadap anak jalanan masih dilakukan di Kota Makasar yang terkendala oleh sarana dan prasarana yang tidak memadai di Kabupaten Jayapura, hal ini berdampak pada berkurangnya jumlah anak yang ikut pelatihan tersebut karena anggaran yang terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut Dinas Sosial Kabupaten

Jayapura kedepannya sebaiknya menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai di wilayah tersebut agar program pelatihan dan ketrampilan terhadap anak jalanan bisa berjalan secara efektif dan efisien. Pengawasan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial tidak hanya ditujukan kepada anak jalanan, tetapi juga kepada orang tua dan masyarakat. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian mereka terhadap keberadaan anak jalanan, yang menjadi kendala bagi Dinas Sosial dalam melaksanakan program pembinaan. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan edukasi/himbauan untuk bersama-sama mengatasi anak jalanan untuk berubah menjadi baik.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Titi Stiawati, "Penanganan Anak jalanan di Kota Serang Provinsi Banten," J. Untirta, 2019, [Online]. Available: <https://jurnal.untirta.ac.id>
- [2] D. Dwi Ratih Chaeroti, "Strategi Penanganan Anak Jalanan di Kota Semarang," E-Journal Undip, 2013, [Online]. Available: <https://ejournal3.undip.ac.id>
- [3] T. Purwoko, "Analisis faktor-faktor penyebab keberadaan anak jalanan di kota Balikpapan," eJournal Sociol., vol. 1, NOMOR 4, p. 3, 2013.
- [4] M. DR. Arief Fahmi Lubis, SE., SH., Perjalanan panjang TNI dalam menjaga negara kesatuan RI dari ancaman terorisme (memandang terorisme dari sudut pandang ancaman kedaulatan negara), Pertama. Pasuruan JATIM: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- [5] M. P. . Dr. H. Masduki Duryat, Peran Jiwa Kepemimpinan: Peran Organisasi kemahasiswaan, Pertama. Indramayu JABAR: CV. Adanu Abimata, 2021.
- [6] D. Gito Sugiyanto, Perencanaan Wilayah dan Perkotaan, Pertama. Padang- Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- [7] M. . Ir. Kusno Hadiutomo, Perencanaan Pembangunan Terintegrasi dan Terdesentralisasi, Pertama. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021.
- [8] D. Khaerul Umam Noer, menyoal Peran Negara dan Masyarakat dalam melindungi Perempuan dan anak, Pertama. Jakarta: PKWG Universitas Indonesia, 2019.
- [9] U. Pauziah, "Perancangansistem pendataan penduduk pada kelurahan Cililitan Jakarta Timur Berbasis delphi," Fakt. Exacta6(3)189-199, vol. 3, p. 3, 2013.

- [10] D. Y. D. Mahulae, Pengantar Manajemen, Pertama. Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022.
- [11] M. Haboddin, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Pertama. Malang - JATIM: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2015.
- [12] D. F. Sodikin, Pendekatan Program Berbasis spasial (mewujudkan Sinergi Pembangunan Nasional dan daerah), Kedua. Bandung JABAR: CV. Cendikia Press, 2020.
- [13] D. Prof. Dr. H. Waini Rasyidin, M. Ed, Landasan pendidikan, Pertama. Bandung-JABAR: UPI PRESS, 2017.
- [14] Fatmawati, Kampanye politik (sebuah pendekatan fenomenologi), Pertama. Banyumas-JAWA TENGAH: CV. Amerta Media, 2021.
- [15] S. Prof. Dr. Agus Suryono, Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan, Pertama. Malang-JATIM: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2010.
- [16] U. Natuna, Cetak Biru Pendidikan Karakter Berbasis Tamadun Melayu di Perguruan Tinggi, Pertama. CV literasi nusantara abadi, 2021.
- [17] K. Kartika, Keperawatan bencana Efektifitas Pelatihan Bencana Pre Hospital Gawat Darurat Dalam Peningkatan Efikasi Diri Kelompok Siaga Bencana dan Non Siaga Bencana, Pertama. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022.
- [18] D. Alif Ilman Mansyur, Pendidikan Anti Korupsi (Menciptakan Pemahaman Gerakan dan Budaya Anti Korupsi), Pertama. Bandung: Cv Widina media Utama, 2022.
- [19] D. Ahmad Saefulloh, S. Pd. I., M. Pd, Model pendidikan Islam bagi pecandu narkoba, Pertama. Yogyakarta, 2019.